



Angka Kemiskinan Berpotensi Turun

■ DPRD DIY Dorong Danais Atasi Ketimpangan Sosial

YOGYA, TRIBUN - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif seiring melandainya Covid-19. Oleh sebab itu, pada 2022 angka kemiskinan yang sempat melonjak pun diprediksi bisa turun.

Kepala BPS Kota Yogyakarta, Mainil Asni, mengatakan, angka kemiskinan di wilayahnya memang mengalami lonjakan akibat dampak pandemi. Benar saja, pada 2020, catatannya masih di angka 7,27 persen dan melesat hingga 7,60 persen memasuki 2021.

"Pandemi memang memacu lonjakan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Termasuk, tingkat pengangguran juga naik. Naik lumayan tinggi. Tapi, gambaran BPS, 2022 membaik," katanya, Selasa (11/10).

Sebaran Covid-19 yang semakin melandai diyakininya bisa menjadi pemicu kebangkitan. Bukan tanpa alasan, geliat pariwisata dan pendidikan, yang selama ini jadi pengungkit ekonomi Kota Yogyakarta, menunjukkan tren positif, bahkan mendekati fase normal.

"Secara kasat mata, kami bisa melihat, pada 2020 dan 2021 kemarin, wisatawan tidak ada yang datang kan, dampaknya Malloboro mati suri, tidak ada transaksi, pendapatan banyak yang hilang," ujarnya.

"Tapi, pariwisata perlahan pulih. Mahasiswa juga berdatangan, setelah lebih dari dua tahun kuliahnya daring. Makanya, gambaran kami, situasinya membaik memasuki '2022 ini," pungkash Mainil.

Di sisi lain, pimpinan De-

KEBANGKITAN EKONOMI

- BPS menyebut pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif.
- Angka kemiskinan yang sempat melonjak pun diprediksi bisa turun.
- Pariwisata perlahan pulih dan mahasiswa mulai berdatangan.
- DPRD DIY terus mendorong penggunaan danais untuk mengatasi ketimpangan.

wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap ada peningkatan kualitas hidup warga DIY pasca dilantikanya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengatakan, momen pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X diluncurkan Senin (10/10). "Ini merupakan pelaksanaan UU keistimewaan, dan tugas DPRD dalam hal ini telah tuntas diselesaikan. Kami berharap pelantikan ini menjadi momentum yang baik untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat DIY," kata Huda Tri Yudiana.

Menurut Huda, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang masih harus diselesaikan, yakni kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di DIY. "Harapan kami intervensi kebijakan dan anggaran yang tepat bisa menurunkan angka ke-

miskinan dan ketimpangan ini," tegas Huda.

Selain itu, dia juga menyoroti dana keistimewaan yang diharapkan lebih berperan lagi dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di DIY. "Penetapan dan dana keistimewaan menjadi paket dari keistimewaan DIY sebagai konsekuensi UU keistimewaan. Danais kami harapkan bisa lebih besar berperan menyelesaikan berbagai masalah DIY dengan kreativitas program sesuai ketentuannya," ujarnya.

Huda mengapresiasi kerja para anggota legislatif yang dalam hal ini menunjukkan kemitraan harmonis antara legislatif dengan eksekutif. "Terkait pesan Presiden Jokowi untuk mengendalikan inflasi dan ketersediaan pangan menurut saya memang penting. Saat ini ancaman inflasi yang diperkuat dengan kenaikan BBM diikuti kenaikan berbagai harga menjadi salah satu masalah serius yang harus kita hadapi bersama," terang Huda.

Kendalikan inflasi
 Menurutnya, kebijakan dan program pemerintah daerah yang tepat sangat penting dilakukan untuk mengendalikan inflasi, meskipun DIY tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat.

Terkait ketersediaan pangan, lanjut Huda Tri Yudiana, DIY telah mengambil kebijakan dan langkah antisipatif sejak lama. Dari sisi kebijakan, DPRD DIY telah menetapkan Perda lahan pertanian berkelanjutan yang mengamankan puluhan ribu hektar lahan untuk pertanian.

Selain itu ada pula program yang mendukung ketersediaan pangan sudah dilakukan. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 16 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005